

ABSTRAK

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki badan pendukung tugas-tugasnya, yaitu Sekretariat DPRD, yang terdiri dari berbagai divisi yang saling berhubungan. Salah satu divisi tersebut adalah Sub bagian Humas, Publikasi, dan Protokol. Humas berfungsi sebagai jembatan komunikasi yang menerima, mengelola, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Humas juga berperan dalam melakukan komunikasi publik untuk membantu DPRD berinteraksi dengan masyarakat secara menyeluruh. Informasi mengenai pembangunan infrastruktur menjadi objek yang dipusatkan dalam komunikasi publik di Humas DPRD, mengingat pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur. Terdapat hambatan yang terjadi, khususnya di bagian Humas, Publikasi, dan Protokol Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi publik yang dilakukan oleh Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul serta menemukan upaya untuk mengatasi hambatan dalam komunikasi publik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini mengacu pada Teori Coordinated Management of Meaning (CMM) yang dikembangkan oleh W. Barnett Pearce dan Vernon Cronen. Kaitannya adalah hambatan pada komunikator tersebut termasuk kedalam salah satu bentuk masalah komunikasi pada proses penyampaian pesan untuk menyampaikan informasi publik, khususnya terkait pembangunan infrastruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi publik di Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul sudah berjalan. Hambatan berupa kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Sub Divisi Humas, Publikasi, dan Protokol mengurangi efisiensi dan efektivitas.

Kata Kunci: Komunikasi Publik, Hubungan Masyarakat, Pembangunan Infrastruktur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

ABSTRACT

The Regional People's Representative Council (DPRD) has a supporting body for its duties, namely the DPRD Secretariat, which consists of various divisions that are interconnected. One of these divisions is the Public Relations, Publications and Protocol Subdivision. Public Relations functions as a communication bridge that receives, manages, and conveys information to the public. Public Relations also plays a role in conducting public communication to help the DPRD interact with the community as a whole. Information on infrastructure development is the object of public communication in DPRD Public Relations, given the importance of transparency and public participation in the infrastructure development process. There are obstacles that occur, especially in the Public Relations, Publications and Protocols section of the DPRD Secretariat in Bantul Regency. This research aims to find out the public communication carried out by the Public Relations of the DPRD Secretariat of Bantul Regency and to find efforts to overcome obstacles in public communication. The research method used is descriptive qualitative with case study type. Data were obtained through interviews, observation, and documentation. This research refers to the Coordinated Management of Meaning (CMM) Theory developed by W. Barnett Pearce and Vernon Cronen. The link is that the obstacles to the communicator are included in one form of communication problem in the process of delivering messages to convey public information, especially related to infrastructure development. The results showed that public communication in the Public Relations of the DPRD Secretariat of Bantul Regency has been running. Barriers in the form of a lack of Human Resources (HR) in the Public Relations, Publications and Protocol Subdivision reduce efficiency and effectiveness.

Keywords: *Public Communication, Public Relations, Infrastructure Development, Regional House Of Representatives*